



BANK MASLAHAT
Dana Syariah Nusantara



2024

**LAPORAN
TRANSPARANSI
PENERAPAN
TATA KELOLA**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN
LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:
Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola
PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

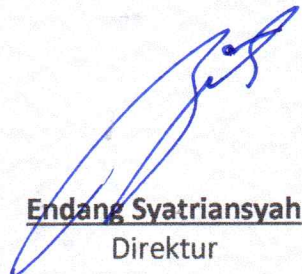
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola baru Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, tanggal 01 Juli 2024.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah baru Bank Perekonomian Rakyat Syariah, tanggal 29 November 2024.

Bengkulu, April 2025

Direksi,



Ahmad Rayendra
Direktur Utama


Endang Syatriansyah
Direktur



BAB 1

PENJELASAN UMUM LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

BPRS merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat. PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara (selanjutnya disebut Bank Maslahat) memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Maslahat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku. Bank Maslahat terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan dan Bank Maslahat juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholder, baik intern maupun ekstern.

Bank Maslahat mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dalam penerapan Tata Kelola di setiap jenjang bagian pada Bank Maslahat, secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPRS dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat.
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPRS secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders).

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
4. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS
5. Penanganan benturan kepentingan.
6. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern.
7. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
8. Batas maksimum penyaluran Dana.
9. Rencana bisnis BPRS.

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Tata Kelola di Bank Maslahat meliputi:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
4. Direksi
5. Pejabat Eksekutif yang meliputi: Internal Audit dan PE Manajeme Resiko dan Kepatuhan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2024 PT. BPRS Maslahat Sana Syariah Nusantara dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPRS Maslahat Sana Syariah Nusantara posisi 31 Desember 2024.





BAB 2
LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : Ahmad Rayendra Jabatan : Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan manajemen PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun perencanaan, Pengurusan / pengelolaanb. Pengawasan kegiatan bank.2. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara meliputi.3. Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan dengan baik, aman dan lancar.4. Menjaga keseimbangan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan serta keseimbangan likuiditas secara optimal.5. Bersama komite pembiayaan menyetujui setiap permohonan pembiayaan yang layak untuk dibiayai.6. Mereview dokumen pembiayaan yang diajukan oleh Spv. Bisnis dan Analis Staff sebelum pembiayaan dicairkan.7. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara kepada Pemilik melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.8. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.9. Mengelola PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.10. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.11. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

12. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
13. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
14. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
2.	<p>Nama : Endang Syatriansyah</p> <p>Jabatan : Direktur, merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Perusahaan. 2. Melakukan pengelolaan BPRS sesuai wewenang dan tanggung jawab Direksi dengan mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. 3. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional dan layanan BPRS serta mendukung kelancaran administrasi bisnis 4. Menerapkan prinsip manajemen risiko dalam seluruh aktivitas usaha bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari PEAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dekom, DPS, OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dekom dan DPS 8. Membantu direktur utama dalam pelaksanaan manajemen bank secara keseluruhan 9. Melaksanakan tugas-tugas teknis Manajemen Melaksanakan tugas koordinasi yang berkaitan dengan tugas bagian Risk Management, Kepatuhan dan operasional 10. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi. 11. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi. 12. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPRS.

13. Memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Komisaris dan DPS

1. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
2. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
3. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
4. Direksi telah melakukan pengembangan produk yaitu produk Istisna'

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : Mohammad Saleh, SE Jabatan : Anggota Dewan Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Sebagai Anggota Dewan Komisaris. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yaitu dengan mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p>

Rekomendasi kepada Direksi

1. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
2. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
3. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
4. Agar Direksi melakukan pengembangan produk baru, terkait kerjasama dengan developer

No.	Keterangan	Nomor	Tanggal
1.	Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Semester 1 tahun 2024	001/MDSN-Komisaris/VII/2024	25 Juli 2024
2.	Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Semester 2 tahun 2024	007/BPRS.MDSN /I/2025/R	20 Januari 2025

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah
1.	<p>Nama : Efrial Susanto Jabatan : Ketua Dewan Pengawas Syariah Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan prinsip syariah di PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara. 2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. 3. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana Bank. 4. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh Direksi dan PE. 5. Membuat dan memelihara risalah rapat. 6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya terkait kepatuhan syariah. 7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah
2.	<p>Nama : Romi Adetio Setiawan, MA Jabatan : Anggota Dewan Pengawas Syariah Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK.

Rekomendasi kepada Direksi

Sepanjang tahun 2024 diselenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 8 (delapan) kali, hasil rapat Dewan Pengawas Syariah telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

1. Agar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah terutama dalam pembiayaan.
2. Opini Syariah terkait produk dan prosedur bank

No.	Keterangan	Nomor	Tanggal
1.	Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester 1 tahun 2024	047/1/BPRS.MDSN/VII/2024/R	23 Juli 2024
2.	Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester 2 tahun 2024	006/1/BPRS.MDSN/I/2024/R	20 Januari 2025

B. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS	:	PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara
Modal Inti BPRS	:	Rp. 4.289.124.798
Total Aset	:	Rp. 24.843.932.317
Periode	:	31 Desember 2024
Nilai Komposit	:	1.7
Peringkat Komposit	:	1

Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

1. **Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar telah terpenuhi
2. **Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**
Belum terpenuhi struktur Dewan Komisaris, proses dan hasil penerapan tata kelola sebagian besar telah terlaksana namun perlu peningkatan dalam pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta terdokumentasi dengan baik.
3. **Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS**
Kecukupan DPS telah terpenuhi, DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik; DPS sudah melakukan pengawasan serta memberikan opini terkait prinsip syariah.
4. **Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite BPRS**
Memiliki modal inti dibawah Rp. 50M

5. **Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS**
BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara dalam menjalankan operasionalnya sudah menerapkan prinsip syariah, sehingga tidak adanya temuan terkait pelaksanaan prinsip syariah, namun memerlukan peningkatan kepatuhan syariah.
6. **Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan**
Selama periode tahun 2024 terdapat 2 transaksi yang memiliki benturan kepentingan. Transaksi tersebut telah diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. **Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan**
Telah terlaksana, namun masih perlu peningkatan terhadap mekanisme dan alat pemeriksaan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern
Telah terlaksana namun masih perlu peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern serta penyusunan program audit
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern
Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku
8. **Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern**
BPRS telah menerapkan kebijakan Manajemen Risiko dan berkomitmen terus melaksanakan peningkatan.
9. **Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana**
BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD); Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD.
10. **Faktor 10: Rencana bisnis BPRS**
Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS. Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham. Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern, prinsip kehati-hatian, asas perbankan sehat dan prinsip syariah.
11. **Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan**
Tersedianya sistem pelaporan keuangan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai; BPRS menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			Bank Maslahat		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	%tase	Nama Perusahaan	%tase
1	Ahmad Rayendra	Direktur Utama	x		PT. Alfatih Ultima Abadi	25%
2	Endang Syatriansyah	Direktur	x			

D. Afiliasi

1. Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Direksi

No	Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Direksi			
			Anggota Direksi Lain	Anggota Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Ahmad Rayendra	Direktur Utama	x	x	x	x
2	Endang Syatriansyah	Direktur	x	x	x	x

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

No	Komisaris	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			Bank Maslahat		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	%tase	Nama Perusahaan	%tase
1	Mohammad Saleh	Komisaris	8.000.000.000	80%	Metropolitan Multi Sarana	25%

3. Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Komisaris

No	Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Komisaris			
			Anggota Direksi	Anggota Komisaris Lain	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Mohammad Saleh	Komisaris	x	x	x	Mohamad Iqbal Muzhaffar - Anak

4. Kepemilikan Saham Anggota DPS

No	DPS	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			Bank Maslahat		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	%tase	Nominal (Rp)	%tase
1	Efrial Susanto	Ketua DPS	x	x	x	x
2	Romi Adetio Setiawan	Anggota DPS	x	x	x	x

5. Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota DPS

No	DPS	Jabatan	Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota DPS			
			Anggota Direksi	Anggota Komisaris	Anggota DPS Lain	Pemegang Saham
1	Efrial Susanto	Ketua DPS	x	x	x	x
2	Romi Adetio Setiawan	Anggota DPS	x	x	x	x

E. Rangkap Jabatan Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Nama Perusahaan Lain	Jabatan
1	Ahmad Rayendra	Direktur Utama	PT. Alfatih Ultima Abadi	Komisaris
2	Endang Syatriansyah	Direktur	x	x
3	Mohammad Saleh	Komisaris	x	x
4	Efrial Susanto	Ketua DPS	PT. BPRS Muamalat Harkat	Ketua DPS
5	Romi Adetio Setiawan	Anggota DPS	x	x

F. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

Periode 31 Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi						
Gaji	2	282,000,000	2	80,500,000	2	34,500,000
Tunjangan	2	25,271,988	2	0	2	0
Tantiem	2	0	2	0	2	0
Bonus	2	0	2	0	2	0
Kompensasi Berbasis Saham	2	0	2	0	2	0
Remunerasi-Lainnya	2	23,500,000	2	9,000,000	1	2,000,000
Total Remunerasi		330,771,988		89,500,000		36,500,000
Fasilitas Lain						
Perumahan	2	0	2	0	2	0
Transportasi	2	0	2	0	2	0
Kesehatan	2	0	2	0	2	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2	0	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain		0		0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		330,771,988		89,500,000		36,500,000

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Komponen	Rasio
1	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.35
2	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.57

3	Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1.25
4	Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	1.71
5	Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	0.41
6	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	3.49

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Agenda
1	03 Desember 2024	3	Pembahasan Rencana Bisnis Bank Periode tahun 2025
2	25 Juli 2024	4	a. Laporan Direksi terkait Tingkat Kesehatan Bank. b. Laporan Direksi terkait realisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2024 untuk semester 1.

Seperti yang telah disampaikan pada hasil penilaian sendiri penerapan tata Kelola, bahwa kegiatan rapat Dewan Komisaris belum terdokumentasi dengan baik, rapat dan pengawasan Komisaris dilakukan secara online kepada Direksi.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Mohammad Saleh	0	2	100

I. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Agenda
1	25 Januari 2024	4	a. Pembiayaan Istishna. b. Opini Syariah DPS tentang pembiayaan Istishna' pada BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara

2	23 April 2024	4	<p>Pembiayaan nasabah an Ibuk Siti;</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk pembiayaan yang sesuai dengan kelengkapan dokumen2 nasabah. Pembiayaan dengan skema Alqordh dan murabahah. Opini syariah DPS tentang pembiayaan nasabah Ibuk Siti berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang Pengalihan Utang
3	17 Mei 2024	3	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi tentang Top up/ Refinancing syariah. Diskusi tentang Take over syariah
4	19 Juli 2024	4	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Audit Internal terkait pemenuhan prinsip syariah produk dan kegiatan MDSN semester satu tahun 2024. Laporan hasil pengawasan DPS semester satu tahun 2024
5	28 Oktober 2024	2	<p>Pemeriksaan Berkas Nasabah Oleh DPS MDSN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ahmad sabarudin, Kanta, Yunita anita, Septri Rosita, Kapliadi, Fisma herayanti, Izhar, Juniarti.
6	26 November 2024	3	Tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan tematik oleh DPS MDSN
7	03 Desember 2024	6	Sosialisasi Materi Refinancing Syariah (Sale and Lease Back) dan IMBT
8	08 Desember 2024	4	<ol style="list-style-type: none"> Analisis laporan Audit Internal terkait pemenuhan prinsip syariah pada produk dan aktivitas PT Maslahat Dana Syariah Nusantara tahun 2024. Persiapan laporan semesteran DPS MDSN semester dua tahun 2024

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Efrial Susanto	8	0	100
2	Romi Adetio Setiawan	4	0	100

Bapak Romi Adetio Setiawan baru menjabat sebagai DPS di Bank Maslahat per tanggal 02 Agustus 2024, sehingga kehadiran rapat tetap 100% meskipun tidak hadir pada seluruh rapat DPS.

J. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun) *)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak-Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
		Perdata	Pidana
1	Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	Nihil	Nihil
2	Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
3	Total	Nihil	Nihil

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Widi Sumadi	Komisaris Utama	Mohammad Saleh, SE	PSP / Komisaris	Pembiayaan	226	Pelunasan pembiayaan pihak terkait an Khairudin Wahid
2	Widi Sumadi	Komisaris Utama	Mohammad Saleh, SE	PSP / Komisaris	Pembiayaan	300	Pelunasan pembiayaan pihak terkait an Wahyu Hidayat

M. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	0



BAB 3 PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Tahun 2024 ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas kinerja manajemen serta seluruh jajaran Sumber Daya Insani PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG).

LAMPIRAN

PT. BPRS MASLAHAT DANA SYARIAH NUSANTARA
Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola
Periode Januari - Desember 2024

No	Faktor	Bobot Faktor	Peringkat	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1.48	0.80	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar telah terpenuhi
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1.78	0.26	belum terpenuhi struktur Dewan Komisaris, proses dan hasil penerapan tata kelola sebagian besar telah terlaksana namun perlu peningkatan dalam pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta terdokumentasi dengan baik.
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1.26	0.15	kecukupan DPS telah terpenuhi, DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik; DPS sudah melakukan pengawasan serta memberikan opini terkait prinsip syariah.
4	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0.00	0.00	BPRS Memiliki modal inti dibawah Rp. 50M
5	Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1.62	0.12	BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara daam menjalankan operasionalnya sudah menerapkan prinsip syariah, sehingga tidak adanya temuan terkait pelaksanaan prinsip syariah, namun memerlukan peningkatan kepatuhan syariah.
6	Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	2.00	0.15	Selama periode tahun 2024 terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan
7	Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1.70	0.13	Telah terlaksana, namun masih perlu peningkatan terhadap mekanisme dan alat pemeriksaan
8	Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1.78	0.13	Telah terlaksana namun masih perlu peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern serta penyusunan program audit
9	Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1.47	0.04	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku;
10	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	2.11	0.16	BPRS telah menerapkan kebijakan Manajemen Risiko dan berkomitmen terus melaksanakan peningkatan
11	Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	2.00	0.10	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD); Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD.
12	Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1.90	0.10	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS. Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham. Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern, prinsip kehati-hatian, asas perbankan sehat dan prinsip syariah.
13	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	2.00	0.10	Tersedianya sistem pelaporan keuangan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai; BPRS menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
Nilai Komposit				1.7	
Peringkat Komposit				1	

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BPRS MASLAHAT DANA SYARIAH NUSANTARA
 Bengkulu, 20 Januari 2025


H. Mohammad Saleh, SE
 Komisaris Utama



Ahmad Rayendra
 Direktur Utama

PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara

**Jl. Kapt. Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 002 RW.001
Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu
Bengkulu**



0736-731 3477 / 0811 7325 444



banksyariahmdsn@gmail.com



www.bankmaslahatbengkulu.com